ARTIKEL

ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2014 - 2016

Oleh:

LELI EKASARI

13.1.02.01.0127

Dibimbing oleh :

1. **LINAWATI, S.Pd., M.Si**
2. **DIAN KUSUMANINGTYAS, S.E., M.M.**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

TAHUN

SURAT PERNYATAAN
ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap	: Leli Ekasari
NPM	: 13.1.02.01.0127
Telepun/HP	: 085 655 533 952
Alamat Surel (Email)	: lelyekasari@gmail.com
Judul Artikel	: Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 - 2016
Fakultas – Program Studi	: Ekonomi - Akuntansi
NamaPerguruan Tinggi	: Universitas Nusantara PGRI Kediri
Alamat PerguruanTinggi	: Jln. Kh. Achmad Dahlan No. 76, Mojoroto, Kediri, Jawa Timur

Dengan ini menyatakan bahwa:

a. artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan bebas plagiarisme;
b. artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggung jawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui		Kediri, 23 Agustus 2018
Pembimbing I	Pembimbing II	Penulis,
Linawati, SPd., M.Si NIDN. 0708048501	Dian Kusumaningtyas, S.E., M.M. NIDN. 0703108302	Leli Ekasari NPM. 13.1.02.01.0127

ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2014 - 2016

Leli Ekasari
13.1.02.01.0127
Fakultas Ekonomi– Prodi Akuntansi
Email :lelyekasari@gmail.com

Linawati, SPd., M.Si[1] dan Dian Kusumaningtyas, S.E., M.M.[2]

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan Kabupaten Tulungagung sebagai salah satu kabupaten di provinsi Jawa Timur yang memiliki banyak potensi yang dapat digali untuk dijadikan sumber pendapatan dari berbagai sektor. Perekonomian Kabupaten Tulungagung digerakkan oleh sektor tersier dan sektor sekunder secara dominan yaitu sektor pertanian, sektor pariwisata sektor perikanan, sektor peternakan, sektor perdagangan dan sektor industri yang dapat meningkatkan PAD.Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk menganalisis kinerja anggaran pendapatan dengan menggunakan analisis varian pendapatan, analisis pertumbuhan pendapatan dan analisis rasio keuangan Kabupaten Tulungagung tahun 2014 – 2016, (2) Untuk menganalisis kinerja anggaran belanja dengan menggunakan analisis varian belanja daerah, analisis pertumbuhan belanja daerah, analisis keserasian belanja daerah dan analisis efisiensi belanja daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2014 – 2016, (3) Untuk menganalisis kinerja pembiayaan dengan menggunakan analisis pembiayaan Kabupaten Tulungagung tahun 2014 – 2016.Penelitian ini menggunakan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Kuantitatif.Data penelitian dari data keuangan anggaran APBD dan laporan realisasi APBD Kabupaten Tulungagung pada tahun 2014 – 2016. Data tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kabupaten Tulungagung pada tahun 2015 mempunyai kecenderungam naik di dalam rasio kemandirian yang tinggi, ini berarti Kabupaten Tulungagung terlalu ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pada tahun 2015, (2) Kinerja pemerintah Kabupaten Tulungagung dapat dikatakan belum baik. Apabila seluruh kegiatan yang direncanakan telah terlaksana, ini menunjukkan telah terjadinya pengendalian belum baik oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung, (3) Kinerja keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung dilihat dari Analisis Varian Pendapatan Daerah sangat efektif.

Kata Kunci : anggaran pendapatan, belanja daerah

I. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara kesatuan yang menetapkan prinsip desentralisasi pemerintahan. Otonomi daerah merupakan wujud dari penerapan prinsip desentralisasi. Pasal 1 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Di daerah – daerah yang bersifat otonom atau bersifat administratif, semua didasarkan pada peraturan yang ditetapkan oleh undang – undang. Di daerah – daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah. Umumnya factor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah adalah kemampuan sumber daya manusia (aparat maupun masyarakat), sumber daya alam, kemampuan keuangan (*financial*), kemampuan manajemen, kondisi sosial budaya masyarakat, dan karakteristik ekologis.

Pasal 18 A UUD 1945, mengamanatkan tentang hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota, diatur undang – undang dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman suatu daerah. Di samping itu, hubungan keuangan, pelayanan umum pemanfaatan sumber daya alam, serta sumber daya alam lainnya antara lain.pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras sesuai undang – undang yang berlaku.

Dalam rangka penyelenggaran pemerintah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka kebijakan politik hukum yang ditempuh oleh pemerintah daerah yang dapat mengatur dan mengurus pemerintah. Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, di arahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing pemerintah daerah, dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi dan keadilan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah. Adapun hubungan fungsi pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah melalui sistem otonomi. Hubungan ini bersifat koordinatif, administratif,

artinya hakikat fungsi pemerintahan tersebut tidak ada yang saling membawahi, namun dengan demikian fungsi dan peran pemerintah provinsi juga mengemban pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu dalam UU nomor 32 tahun 2004 tujuan utamanya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintahan terlihat bahwa sistem pengelolaan keuangan pada dasarnya merupakan subsistem dari pemerintahan itu sendiri.

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Pasal 23 ayat 2 UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil dan patut terhadap UU yang berlaku.

Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah itu sendiri. Tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembanguan daerah, mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan layanan kualitas publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi dan karakteristik dari masing – masing daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan yang luas, utuh dan bulat pada akhirnya harus dipertanggung jawabkan kepada pemberi wewenang dan masyarakat. Oleh karena itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pada hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kerja. Artinya, APBD harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas sasaran yang hendak dicapai. Dengan demikian alokasi dana yang dipakai untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar – benar dirasakan

oleh masyarakat dan pelayanan pada orientasi kepentingan publik.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, kinerja pemerintah sangat penting untuk diukur dan dilihat. Keberhasilannya suatu pemerintahan di era otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang telah dicapainya. Pengelolaan anggaran ini berdasarkan kriteria ini memberikan gambaran khusus terkait dengan kemampuan suatu daerah untuk selalu menggali potensi daerah guna meningkatkan anggaran pendapatan. Dalam anggaran berbasis kinerja secara struktur meliputi anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Penekanan pada belanja daerah menjadi titik perhatian terutama dalam segi belanja membutuhkan kinerja yang lebih baik.

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntunan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntanbilitas. Kedua aspek tersebut menjadi lebih penting dalam hal pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan keuangan Negara maupun daerah. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002:20).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah yang yang dituangkan dalam bentuk angka dan batas maksimal untuk periode anggaran. Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah hendaknya didukung oleh upaya pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Hanum (2011) menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Studi Kasus Pada Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2007 – 2009). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pendapatan dari tahun ke tahun tetapi pendapatan tersebut lebih banyak diperoleh dari dana perimbangan artinya Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai masih ketergantungan pada pemerintahan pusat.

Penelitian yang dilakukan oleh Marchelino (2013) menganalisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Studi Kasus Pada Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2009-2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pendapatan belum efektif hal ini terlihat dari lebih kecilnya jumlah yang terealisasi dengan yang telah dianggarkan.Sedangkan untuk kinerja belanja sudah efektif hal ini dapat dilihat dari kecilnya anggaran belanja yang terrealisasi dari yang telah dianggarkan.

Penelitian yang dilakukan Aprilia (2016) menganalisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Studi Kasus Pada Kota Kediri Tahun Anggaran 2009 – 2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Kediri tahun 2009 – 2013 dalam merealisasi pajak daerah dapat dikatakan efektif dan efisien, dan pertumbuhan pendapatan menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Melihat keadaan yang ada maka pengukuran kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dapat dilakukan dengan mengkombinasikan analisis perbandingan laporan keuangan, analisis trend (pertumbuhan) dan analisis rasio. Kabupaten Tulungagung pada tahun 2011 – 2013 pada pendapatan mengalami perubahan yang baik dimana pendapatan pada tahun 2012 yaitu Rp. 1.332.422.351.566, tahun 2013 yaitu Rp. 1.559.994.000.000 dan pada tahun 2013 yaitu Rp. 1.774.874.000.000. pada varian belanja daerah untuk Kabupaten Tulungagung pada tahun 2011 yaitu Rp. 1.296.018.918.673, tahun 2012 yaitu 1.576.895.000.000, pada tahun 2013 yaitu 1.612.797.000.000 dapat disimpulkan bahwa varian belanja daerah Kabupaten Tulungagung mengalami kenaikan yang baik. Pada analisis pembiayaan Kabupaten Tulungagung juga mengalami kenaikan yang dimana pada tahun 20111 yaitu Rp. 74.878.210.111, pada tahun 2012 yaitu Rp. 100.746.000.000 dan penurunan pada tahun 2013 yaitu Rp. 87.067.000.000. Melihat kinerja keuangan pendapatan daerah dan kinerja keuangan belanja daerah, maka dapat dinilai kinerja keuangan APBD secara umum,

II. METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Kuantitatif. Pendekatan Kuantitatif adalah

pendekatan penelitian yang menggunakan data yang berbentuk angka, atau data kuantitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2007:10).

Teknis Analisis Data

Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian in menggunakan teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah

Berdasarkan realisasi anggaran dapat dilakukan analisis pendapatan daerah dengan cara:

a) Analisis Varian Pendapatan Daerah

Analisis varian pendapatan daerah dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Jika terdapat selisih lebih (realisasi pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan) maka dikatakan memiliki kinerja keuangan pendapatan yang baik, Sedangkan jika terdapat selisih kurang (realisasi pendapatan kurang dari jumlah yang dianggarkan) maka kinerja keuangan pendapatan daerah dinilai kurang baik (Mahmudi, 2010).

$$\text{Analisis varians} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Tahun t}}{\text{Anggaran Pendapatan Tahun t}} x\ 100\%$$

b) Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Analisis pertumbuhan pendapatan daerah bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan mengetahui apakah pemerintah atau selama periode anggaran, kinerja keuangannya mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif. Pertumbuhan secara positif dikatakan kinerja keuangan Pendapatan cenderung meningkat, sedang pertumbuhan secara negatif dikatakan kinerja keuangan pendapatan mengalami penurunan (Mahmudi, 2010).

$$\text{Pertumbuhan PAD tahun t} = \frac{\text{PAD Tahun t} - \text{PAD Tahun (t}-1)}{\text{PAD Tahun (t}-1)} x\ 100\%$$

c) Analisis Rasio Keuangan Pendapatan Daerah

1) Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan. Semakin tinggi PAD, maka semakin tinggi kemarnpuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2010). Menurut artikel yang diterbitkan Kementerian

Keuangan (2011), jika derajat desentralisasi berada di atas 50% menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu rnenyelenggarakan desentralisasi.

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} x\ 100\%$$

2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar tingkat ketergantungan pernerintah daerah terhadap pernerintah pusat atau pemerinitah propinsi (Mahmudi, 2010). Menurut Kementerian Keuangan (2011), jika rasio ketergantungan keuangan daerah berada di bawah 50% berarti pemerintah daerah memiliki ketergantungan keuangan daerah yang rendah.

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Tranfer}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} x\ 100\%$$

3) Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah

Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektivitas pajak dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka 100%, sedang rasio efisiensi pajak dikatakan baik jika kurang dari 10%. Data biaya pemungutan pajak dapat diperoleh dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) (Mahmudi, 2010)

$$\text{Rasio Efisiensi Pajak Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} x\ 100\%$$

$$\text{Rasio Efektifitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} x\ 100\%$$

4) Derajat Kontribusi BUMD

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah (Mahmudi, 2010).Jika rasio ini menunjukkan angka di atas 0% maka dikatakan perusahaan daerah telah memiliki kontribusi terhadap pendapatan daerah.

$$\text{Derajat Kontribusi BUMD} = \frac{\text{Pendapatan Bagian Laba BUMD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} x\ 100\%$$

2. Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Berdasarkan infomasi pada laporan realisasi anggaran, kita dapat melakukan analisis kinerja keuangan belanja daerah dengan cara:

a. Analisis Varians Belanja Daerah

Analisis varians belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dan anggaran. Jika terdapat selisih lebih

(realisasi belanja melebihi jumlah yang dianggarkan) maka dikatakan memiliki kinerja keuangan belanja yang tidak baik, sedangkan jika terdapat selisih kurang (realisasi belanja kurang dari jumlah yang dianggarkan) maka kinerja keuangan belanja dinilai baik (Mahmudi,2010).

$$\text{Analisis Varians} = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun t}}{\text{Anggaran Belanja Tahun t}} x\ 100\%$$

b. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

Analisis pertumbuhan belanja daerah berguna untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun. Belanja daerah itu sendiri biasanya memiliki kecenderungan untuk naik, kenaikan tersebut terjadi karena adanya penyesuaian dengan inflasi, perubahan nilai tukar rupiah, perubahan cakupan pelayanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi, Kenaikan wajar atau tidaknya perla melihat beberapa hal yang disebutkan sebelumnya dan alasan kenaikan belanja terjadi, apakah karena kenaikan internal yang relatif terencana dan terkendali ataukah faktor eksternal yang diluar kendali pemerintah daerah (Mahmudi, 2010).

$$\text{Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun t} = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun t} - \text{Realisasi Belanja Tahun (t} - 1)}{\text{Realisasi Belanja Tahun (t} - 1)} x\ 100\%$$

c. Analisis Keserasian Belanja Daerah

Analisis keserasian belanja daerah merupakan analisis di mana titik fokus analisis berada pada 3 fungsi utama anggaran, yaitu sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Analisis keserasian belanja daerah meliputi:

1) Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Rasio ini memberi informasi mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi adalah belanja yang manfaatnya dapat habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran. Pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60%-90% (Mahmudi, 2010).

$$\text{Rasio Belanja Operasi terhadap Belanja Total} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} x\ 100\%$$

Sumber: Aprilia (2015)

2) Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

Rasio ini dapat digunakan untuk mengetahui proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal dalam tahun anggaran bersangkutan. Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja

daerah adalah antara 5%-20% (Mahmudi, 2010).

$$\text{Rasio Belanja modal terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} x\ 100\%$$

d. Analisis Efisiensi Belanja Daerah

Rasio dalam analisis efisiensi belanja daerah ini digunakan untuk mengukjur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah.Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%.sebaliknya jika lebih dari 100% mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran (Mahmudi, 2010).

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}}\ x\ 100\%$$

3. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan dilakukan untuk pola anggaran pemerintah daerah. Selain itu juga dapat digunakan untuk membaca kebijakan anggaran pemerintah daerah.Salah satuyang paling urgen dalam pembiayaan ini adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Makin besarnya SILPA yang diperoleh dari sesuatu anggaran dapat dijadikan salah satu indikator kurang tepatnya penyajian suatu rencana anggaran. Menurut Merizka (2010), cara untuk menghitung pembiayaan. dalam SILPA dengan cara membandingkan realisasi S1LPA dengan target SILPA.

III. HASIL DAN KESIMPULAN

Berdasarkan perhitungan pada perhitungan Analisis Varian Pendapatan Daerah pada tahun 2014 – 2016 mengalami peningkatan yang baik. Pada tahun 2014 Rp. 2.114.550.000.000,00, pada tahun 2015 Rp. 2.369.737.223.685,00, dan pada tahun 2016 Rp. 2.570.279.524.128,00.

Tabel 1
Analisis Varian Pendapatan Daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2014-2016

Tahun	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan(Rp)	Presentase Realisasi Pendapatan
2014	1.586.334.000.000	2.114.550.000.000	133,3%
2015	2.203.170.000.000	2.369.737.223.685	107,6%
2016	2.405.226.678.158	2.570.279.524.128	106,9%

Menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung dilihat dari Analisis Varian Pendapatan Daerah sangat efektif. Dikarenakan adanya selisih pada Realisasi Pendapatan dengan Anggaran Pendapatan. Pada tahun 2014 di mana terjadi selisih yang lebih tinggi dari tahun yang lain yaitu sebesar Rp. 555.305.000.000,00.

Tabel 2
Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2014-2016

Tahun	PAD(Rp)	Pertumbuhan
2014	276.578.000.000	0,58%
2015	309.646.000.000	0,12%
2016	342.570.000.000	0,14%
Rata – Rata		0,26%

Berdasarkan perhitungan pada perhitungan Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah pada tahun 2014 – 2016 mengalami rata – rata yang baik. Pada tahun 2012 0,21%, tahun 2013 0,23%, tahun 2014 0,14%. Pada Kabupaten Tulungagung mengalami pertumbuhan yang positif, dikarenakan pada kinerja pendapatan mengalami kenaikan.

Tabel 3
Analisis Derajat Desentralisasi
Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2014-2016

Tahun	PAD(Rp)	Pendapatan Daerah(Rp)	Rasio Derajat Desentralisasi
2014	276.578.000.000	2.114.550.000.000	13,1%
2015	309.646.000.000	2.369.737.223.685	13,1%
2016	342.570.756.799	2.570.279.524.128	13,3%
Rata – Rata			0,121

Berdasarkan tabel 3 tentang Derajat Desentralisasi Kabupaten Tulungagung menunjukkan bahwa derajat desentralisasi pada tahun 2014 – 2016 dapat dikatakan rendah atau kurang. Pada tahun 2014 13,1%, pada tahun 2015 13,1% dan pada tahun 2016 13,3%. Jadi dalam hal ini pemerintah kabupaten Tulungagung kurang bisa menyelenggaraan desentralisasi daerah. Karena pada Kabupaten Tulungagung mendapatkan Pendapatan Asli Daerah yang rendah, jika PAD semakin tinggi maka akan bisa menyelenggarakan desentralisasi yang baik.

Tabel 4
Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2014-2016

Tahun	PAD(Rp)	Bantuan Pemerintah Pusat/Daerah + Pinjaman(Rp)	Rasio Kemandirian
2014	276.578.000.000	-	-
2015	309.646.000.000	188.480.253.000	60,8%
2016	342.570.756.799	145.663.480.000	42,5%
Rata – Rata			60,8%

Berdasarkan tabel 4 tentang Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dapat dilihat bahwa Kabupaten Tulungagung pada tahun 2015 mempunyai kecenderungan naik didalam rasio kemandirian yang tinggi, ini berarti Kabupaten Tulungagung terlalu ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pada tahun 2015. Pada tahun 2015 Rasio Kemandirian mencapau 60,8% jadi pada Kabupaten Tulungagung masih sangat besar tinggat ketergantungan terhadap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.

Tabel 5
Analisis Rasio efektifitas Pajak Daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2014-2016

Tahun	Pajak Daerah		Rasio Efektifitas
	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	
2014	50.005.000.000	56.751.000.000	114%
2015	53.873.000.000	62.340.809.295	116%
2016	65.070.260.000	67.457.168.815	104%
Rata – Rata			111,33%

Tabel 6
Analisis Rasio Efisiensi Pajak Daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2014-2016

Tahun	Retribusi Daerah		Rasio Efisiensi
	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	
2014	23.937.000.000	27.359.000.000	2,07%
2015	18.490.000.000	19.332.326.783	3,22%
2016	22.609.904.000	22.674.086.533	2,97%
Rata – rata			2,28%

Berdasarkan tabel 5 dan tabel 6 Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah dikatakan bahwa Dinas Pendapatan Daerah sangat efektif dalam merealisasi pajak daerah yang direncanakan dengan rata – rata rasio efektifitas pajak daerah.Hal ini menunjukkan kinerja sangat baik.Pada efisiensi pajak daerah menunjukkan bahwa efisiensi rata – rata rasio efisiensi pajak sangat efisien. Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Pada Kabupaten Tulungagung efektivitas dalam pengumpulan Pajak Derah dikatakan sangan baik karena mempunyai rata –

rata 111,33%. Dan pada Efisiensi Pajak Daerah dikatakan baik karena rata – rata dari efisiensinya adalah 2,28%.

Tabel 7
Analisis Rasio Derajat Kontribusi BUMD
Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2014-2016

Tahun	Bagian Laba BUMD(Rp)	Penerimaan PAD(Rp)	Derajat Kontribusi BUMD
2014	3.794.000.000	276.578.000.000	1,37%
2015	4.125.888.858	309.646.000.000	1,33%
2016	4.553.186.053	342.570.756.799	1,33%
Rata – Rata			1,34%

Berdasarkan tabel 7 Derajat Kontribusi BUMD bahwa pada Kabupaten Tulungagung pada tahun 2014 – 2016 rasio derajat kontribusi BUMD mengalami perubahan yang signifikan yang menunjukkan pada keadaan yang positif.Pada tahun 2014 Derajat Kontribusi BUMD memperoleh rasio 1,37%, tahun 2015 1,33%, tahum 2016 1,33%. Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah.Pada Kabupaten Tulungagung memiliki rata – rata pada Derajat Kontribusinya adalah 1,34% dikatan baik karena lebih dari 0% dan dapat dikatan telah memiliki kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Tabel 8
Analisis Rasio Varians Belanja Daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2014-2016

Tahun	Anggaran Belanja(Rp)	Realisasi Belanja(Rp)	Selisih(Rp)
2014	1.583.425.000.000	1.967.387.000.000	383.962.000.000
2015	2.213.020.000.000	2.317.348.435.617	104.328.435.617
2016	2.393.283.166.158	2.606.293.854.903	213.010.688.745

Berdasarkan tabel 8 Analisis Varians Belanja Daerah kinerja pemerintah Kabupaten Tulungagung dapat dikatakan belum baik karena realisasi pada Kabupaten Tulungagung melebihi anggaran yang telah di tetapkan. Pada tahun 2014 selisih Realisasi Belanja sebesar Rp. 383.962.000.000, tahun 2015 sebesar Rp. 104.328.435.617, tahun 2016 sebesar 213.010.688.745.

Tabel 9
Analisis Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2016

Tahun	Belanja Daerah(Rp)	Tingkat Pertumbuhan
2013	1.612.797.000.000	-
2014	1.967.387.000.000	0,22%
2015	2.317.348.435.617	0,18%
2016	2.606.293.854.903	0,19%
Rata – Rata		0,20%

Berdasarkan tabel 9 Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah analisis rasio pertumbuhan belanja daerah pemeritah Tulungagung mengalami kenaikan denga rata-rata 20% pertahun. Hal ini dikarenakan kenaikan eksternal yang diluar kendali pemerintah daerah yang dimana terjadi pada belanja Modal. Analisis pertumbuhan belanja daerah berguna untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun.

Tabel 10
Analisis Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2016

Tahun	Realisasi Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja Daerah(Rp)	Presentase Rasio Belanja Operasi thd Belanja Total
2014	1.651.278.000.000	1.967.387.000.000	83,9 %
2015	1.441.414.047.962	2.317.348.435.617	62,20 %
2016	1.534.651.124.833	2.606.293.854.903	77,03%

Berdasarkan tabel 10 Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja analisis belanja operasi terhadap total belanja habis digunakan antara 62,20% sampai 83,90% pertahun. Dimana dalam hasil presentase yang ada pada Belanja Operasi lebih banyak digunakan dari Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Rasio ini memberi informasi mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Pada Kabupaten Tulungagung telah dikatakan baik karena mempunyai proporsi belanja operasi mendominasi belanja daerah.Belanja operasi adalah belanja yang manfaatnya dapat habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran.

Tabel 11
Analisis Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2016

Tahun	Realisasi Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah(Rp)	Presentase Rasio Belanja Operasi thd Belanja Total
2014	315.546.000.000	1.967.387.000.000	16,04 %
2015	875.934.387.655	2.317.348.435.617	37,79 %
2016	574.341.318.491	2.606.293.854.903	22,04%

Berdasarkan tabel 11 Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja analisis belanja operasi terhadap total belanja habis digunakan antara 16,04% sampai 37,79% pertahun. Dimana dalam hasil presentase tersebut dapat dikatakan belanja modal pada Kabupaten Tulungagung untuk investasi baik. Rasio ini dapat digunakan untuk mengetahui proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal dalam tahun anggaran bersangkutan

Tabel 12
Analisis Rasio SILPA
Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2014-2016

Tahun	Realisasi SILPA(Rp)	Anggaran SILPA(Rp)	Selisih (Rp)	Presentase
2014	181,609.000.000	1.324.000.000	180.285.000.000	13,7 %
2015	238.334.915.703	8.965.000.000	229.369.915.703	2,7 %
2016	284.804.899.767	2.006.488.000	282.798.411.767	14,2%

Berdasarkan tabel 12 Analisis Rasio Varians Belanja Daerah analisis pembiayaan dari tahun 2014 sebesar 13,7% dengan kriteria efisien, tahun 2015 adalah 2,7% dengan kriteria sangat efisien dan tahun 2016 sebesar 14,2% dengan kriteria sangat efisien. Salah satu yang paling urgen dalam pembiayaan ini adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).Makin besarnya SILPA yang diperoleh dari sesuatu anggaran dapat dijadikan salah satu indikator kurang tepatnya penyajian suatu rencana anggaran.

IV. PENUTUP

1. Analisis kinerja anggaran pendapatan Pemerintahan Kabupaten Tulunggung dengan menggunakan analisis varian pendapatan didapatkan sangat efektif. Dikarenakan adanya selisih pada Realisasi Pendapatan dengan Anggaran Pendapatan. Pada pertumbuhan pendapatan Kabupaten Tulungagung mendapatkan Pendapatan Asli Daerah yang rendah, jika PAD semakin tinggi maka akan bisa menyelenggarakan desentralisasi yang baik. Pada rasio keuangan Kabupaten Tulungagung dikatakan belum baik karena masih tergantung pada bantuan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.
2. Analisis kinerja anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan analisis varian belanja daerah dapat

dikatakan dengan belum baik karena realisasi pada Kabupaten Tulungagung melebihi anggaran yang telah di tetapkan. Pada pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Tulungagung dikatakan mengalami kenaikan eksternal yang diluar kendali pemerintah daerah yang dimana terjadi pada belanja Modal. Pada efisiensi belanja Kabupaten Tulungagung dikatakan baik karena didalam Operasi Belanja pada umumnya sudah termasuk dengan persentase masing – masing dari belanja operasi dan belanja modal.

3. Analisis kinerja anggaran pembiyaan pada Kabupaten Tulungagung dikatakan efisien dilihat dari persentase masing – masing tahun. Tapi dapat disimpulkan kurang tepatnya penyajian suatu anggaran karena di dalam pembiyaan ini lebih besar SILPA yang diperoleh dari pada yang dianggarkan.

V. DAFTAR PUSTAKA

Aprilia, Riswan, 2016. *Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Kediri.*UNP Kediri. (Online), tersedia: file:///J:/11.1.02.01.0156.pdf, diunduh 12 Maret 2016.

Hanum, Zulia. 2011. *Analisis Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serdang Bedagai.*(Online), tersedia: file:///J:/skripsi%20APDB%201%20jurnal/125-165-1-PB.pdf, di unduh 10 April 2016.

Marchelino.2013. *Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.*Universitas Sam Ratulangi Manado. (Online), tersedia: file:///J:/skripsi%20APDB%201%20jurnal/1942-3553-1-SM.pdf, di unduh 12 Februari 2016.

Mardiasmo.2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Mahmudi.2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Merizka, Addina. 2009. *AnalisisKinerjaAnggaranPendapatandanBelanja Daerah Pemerintah Kota Medan.*Universitas Sumatera Utara. (Online), tersedia: file:///J:/skripsi%20APDB%201%20jurnal/10E00382.pdf, di unduh 10 April 2016

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

UU.Nomor 12. 2008, Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

UU.Nomor 32. 2004, Tentang pemerintah daerah

UUD. 1945,